

**PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN
SENSUS PAJAK NASIONAL DAN KESADARAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RINTA MULIA DEWINTA

NIM. C2C607130

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rinta Mulia Dewinta
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607130
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN
SENSUS PAJAK NASIONAL DAN
KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt.

Semarang, 3 September 2012

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt.)

NIP. 19620416 198803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rinta Mulia Dewinta
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607130
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN
SENSUS PAJAK NASIONAL DAN KESADARAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 18 September 2012

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt. (.....)

2. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)

3. Dr.H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rinta Mulia Dewinta, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 September 2012

Yang membuat pernyataan,

(RINTA MULIA DEWINTA)

NIM : C2C607130

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Segalanya akan mudah, karena ada Allah.

Bukan berapa kali kita mengalami kegagalan,
tetapi bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan itu.

Surat Al- Insyirah ayat 6 :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

“Man Jadda wa Jadda”

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Pemilik jiwa dan raga ini, Sang Maha Pengasih dan Penyayang

Mama dan Papa tercinta, untuk segala hal yang telah diberikan

dan tak akan mungkin terbalas

Adik terkasih, untuk semangat dan inspirasinya

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that influence tax compliance in the Regional Tax Office Special Region of Yogyakarta. Research design is survey research using questionnaire as instrument. The respondents of this research are taxpayer's especially business owners who are in the business district, high-rise building or office and have stickers of Sensus Pajak Nasional.

This research use the perception of Sensus pajak Nasional and tax awareness as independent variable on taxpayer's compliance as dependent variable. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis with SPSS 20.00 for windows.

The findings of this research show that, the effect of : (1) perception of Sensus pajak Nasional on taxpayer's compliance is positive and significant. (2) tax awareness on taxpayer's compliance is positive and significant.

Keywords: perception of Sensus pajak Nasional, tax awareness, taxpayer's compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan desain survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak khususnya pemilik usaha yang berada di kawasan bisnis, *high rise building* atau perkantoran dan telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional.

Penelitian ini menggunakan persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20.00 *for Windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan (2) kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Kata Kunci: persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan, kepatuhan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘allamiin segala puji syukur hamba panjatkan kehadirat-Mu Ya Allah, hanya atas ridho dan rahmat-Mu, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si, Akt selaku selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler sekaligus sebagai dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan masukan dan saran serta dukungan bagi penelitian ini.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

5. *My beloved parents*, Ibu Wiwin Susmiati dan Bapak Mulyono, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta do'a dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. *I Love U so much mom 'n dad.....!!*
6. *My brother*, Wahyu Agung Bantarangin *and my cousins*, Salma Resti Anggraeni, Hamima Oriza Febiantari, Fadhila Azelita Putri Saputro yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Seluruh keluarga besar Depok dan keluarga besar Magelang.
8. Cenditria Yuliantho atas kesabaran, kritik, motivasi dan nasihat-nasihatnya.♥
9. *My best friends*, Enny Dwi Maharti, Arisha Hayu Pramesthiningtyas, Winna Titis Sugihanti, Rahardyan Dwa Prihasdi, Muhammad Danu, Andiyani, Indhi, Nike, Martina, Kak Sephine atas persahabatan, menemani dalam suka dan duka, menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi, penyemangat, serta teman diskusi yang baik, semoga kita tetap kompak. *Keep Smiling.....Keep Shining! ...♥*
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai masukan yang berarti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Semarang, 3 September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	13
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>).....	13
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial.....	15
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	17

2.1.4	Persepsi	20
2.1.5	Sensus Pajak Nasional	22
2.1.6	Kesadaran Perpajakan	29
2.2	Penelitian Terdahulu	30
2.3	Kerangka Pemikiran	34
2.4	Pengembangan Hipotesis	35
2.4.1	Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38
3.1.1	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	38
3.1.2	Variabel Independen: Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	39
3.1.3	Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan	39
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	39
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis Data	43
3.5.1	Statistik Deskriptif	43
3.5.2	Uji Reliabilitas dan Validitas	44
3.5.2.1	Uji Reliabilitas	44
3.5.2.2	Uji Validitas	45

3.5.3 Uji Asumsi Klasik	45
3.5.3.1 Uji Normalitas	45
3.5.3.2 Uji Multikolonieritas	47
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
3.5.4 Model Regresi	49
3.5.5 Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)	50
3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	51
3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.1.1 Deskripsi dan Distribusi Kuesioner Penelitian	53
4.1.2 Deskripsi dan Demografi Responden	55
4.2 Statistik Deskriptif	57
4.3 Analisis Data	59
4.3.1 Uji Kualitas Data	59
4.3.1.1 Uji Reliabilitas	59
4.3.1.2 Uji Validitas	60
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	61
4.3.2.1 Uji Normalitas	62
4.3.2.2 Uji Multikolonieritas	63

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	64
4.3.3 Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)	66
4.3.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.3.3.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	68
4.3.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	69
4.4 Interpretasi Hasil	72
4.4.1 Hipotesis Pertama (H1)	72
4.4.2 Hipotesis Kedua (H2)	76
BAB V PENUTUP	80
5.1 Simpulan	80
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2012	2
Tabel 1.2	Tax Ratio Indonesia Periode 2001-2011	4
Tabel 1.3	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan Tahun 2008-2011	5
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Daftar KPP Lingkup Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	40
Tabel 4.1	Deskripsi Objek Penelitian	54
Tabel 4.2	Tabulasi Silang Jenis Usaha dan Jenis Wajib Pajak	55
Tabel 4.3	Tabulasi Silang Lama Berdirinya Usaha dan Jenis Wajib Pajak	56
Tabel 4.4	Tabulasi Silang Lama Memiliki NPWP dan Jenis Wajib Pajak	56
Tabel 4.5	Tabulasi Silang Lama Memiliki NPWP dan Jenis Wajib Pajak	57
Tabel 4.6	Hasil Analisis Deskriptif	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolonieritas	64
Tabel 4.11	Hasil Uji Glejser	65
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Berganda	66
Tabel 4.13	Koefisien Determinasi (R^2)	67
Tabel 4.14	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	69
Tabel 4.15	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	72
Tabel 4.16	Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sensus	76
Tabel 4.17	Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sadar	79
Tabel 4.18	Ringkasan Hasil Penelitian	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahap Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	27
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Teoritis	35
Gambar 4.1	<i>Normal P-P Plot</i>	63
Gambar 4.2	<i>Scatter Plot</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Kuesioner Penelitian	86
Lampiran B	Validitas dan Reliabilitas	90
Lampiran C	Data Penelitian	94
Lampiran D	Analisis Data	102

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas beberapa sebab yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Penjelasan sub bab tersebut sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2011). Ini terjadi karena pajak adalah sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara (Jatmiko, 2006). Dan dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2012

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307	878,685	1,019,333
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,900
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,270	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,670	28,915	46,940	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899
Penerimaan Bukan Pajak	215,120	320,604	227,174	268,942	286,568	272,720
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,050	30,097	28,836	25,590
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429	50,340	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591	15,416	17,861
Jumlah	706,108	979,305	847,096	992,249	1,165,253	1,292,053
Prosentase Penerimaan Pajak dibanding Total	69,53%	67,26%	73,18%	72,90%	75,41%	78,89%

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang karena pembulatan

1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)

3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Sumber : Badan Pusat Statistik dan data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa total penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Dalam setiap

tahunnya, terlihat adanya peningkatan prosentase penerimaan pajak sebesar dua hingga lima persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,92% yang sebelumnya terjadi penurunan sebesar 2,27%. Dan selama lima tahun terakhir, rata-rata penerimaan pajak adalah sebesar 71,66% dari total pendapatan Negara. Sedangkan pada tahun 2012, pemerintah telah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN mencapai Rp 1.019.333 triliun, sehingga penerimaan sektor itu memberikan kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan Negara.

Akan tetapi kenaikan penerimaan pajak yang signifikan tersebut masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Fakta di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum optimalnya angka *tax ratio* (Jatmiko, 2006). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara.

Selama kurun waktu 22 tahun Indonesia hanya mampu menaikkan *tax ratio*-nya sebesar 3,92 % yang dihitung dari *tax ratio* 2011 sebesar 12,11% dikurangi *tax ratio* 22 tahun yang lalu yaitu pada akhir pelita 1 tahun 1989 sebesar 8,19%. Untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia sebesar 1%, rata-rata Indonesia membutuhkan waktu 5,6 tahun (diperoleh dari 22 tahun dibagi 3,92%), sementara untuk bisa setara dengan *tax ratio* Negara-Negara berkembang lainnya yang sudah mencapai sekitar 20% berarti Indonesia masih tertinggal 7,89%. Pada Tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat nilai *tax ratio* selama beberapa periode.

Tabel 1.2
***Tax Ratio* Indonesia**
Periode 2001-2011

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (%)
1989	8.19
1990	9.16
1991	10.92
1992	10.66
1993	10.95
1994	10.77
1995	11.21
1996	10.33
1997	10.32
1998	10.50
1999	10.29
2000	10.16
2001	12.80
2002	13.05
2003	11.83
2004	12.34
2005	12.46
2006	12.16
2007	12.43
2008	13.30
2009	11.43
2010	11.57
2011	12.11

Sumber: www.pajak.go.id dalam Miladi (2010)

Lambannya kenaikan *tax ratio* dikarenakan masih banyaknya kebocoran pajak terkait dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih dirongrong pungutan liar, suap dan korupsi pajak (Berita Pajak, 4 Mei 2010 dalam Miladi, 2010) sehingga menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan pajak di negeri ini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak juga merupakan salah satu faktor utama rendahnya

tax ratio. Sebenarnya, nilai *tax ratio* masih bisa ditingkatkan karena beberapa tahun terakhir jumlah Wajib Pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian, tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Pada Tabel 1.3 berikut ini dapat dilihat perkembangan dan kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan
Tahun 2008-2011

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	WP terdaftar yang wajib melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2008	7.137.023	6.341.828	2.097.849	33,08%.
2009	10.682.099	9.996.620	5.413.114	54,15%.
2010	15.911.576	8.202.309	8.202.309	57,5%.
2011	19.410.174 ^{*)}			

^{*)}Data Per 28 Februari 2011

Sumber: www.finance.detik.com

Dari data diatas, diketahui bahwa dari tahun ke tahun semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak dan semakin meningkatnya prosentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Meskipun perkembangan pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak menunjukkan perbaikan yang cukup pesat, namun angka tersebut masih berkontribusi kecil terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Bila dilihat dari kelompok kerja aktif, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta. Namun, pembayaran

pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT untuk orang pribadi hanya sekitar 8,5 juta, sehingga rasio SPT terhadap kelompok kerja aktif hanya mencapai 7,73%. Sementara untuk badan usaha, pembayaran pajak yang melaporkan melalui SPT hanya berjumlah 466 ribu. Padahal jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berjumlah sekitar 12,9 juta. Dan prosentase kepatuhan Wajib Pajak Badan hanya sebesar 3,6% (www.pajak.go.id).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Dewi, 2011). Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.go.id). Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan.

Keberhasilan program Sensus Pajak Nasional tidak lepas dari persepsi masyarakat yang positif. Untuk mengatasi respon yang kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik petugas SPN juga diperlukan

dukungan semua pihak terkait. Persepsi positif masyarakat terhadap SPN dan kesadaran perpajakan akan mendorong pada kepatuhan sukarela.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB baik secara parsial maupun secara simultan.

Suryadi (2006) meneliti tentang hubungan kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Suryadi (2006) menemukan bahwa jika Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dari hasil penelitian, hanya variabel kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Jatmiko (2006) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian Jatmiko (2006) menggunakan tiga variabel bebas yaitu sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap

kesadaran perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Supriyati & Nur Hidayati (2008) menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sasaran dalam penelitian adalah Wajib Pajak Badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Nur Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Supadmi (2009) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas pelayanan. Dalam penelitiannya, Supadmi (2009) menemukan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan agar dapat memberikan 4 K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar. Muliari & Setiawan (2011) menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian Muliari & Setiawan (2011) menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fokus penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang menguji kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang secara khusus meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar, penelitian ini menguji kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti juga mengganti variabel independen yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan menjadi persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) karena Sensus Pajak Nasional merupakan program terbaru Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang pada hakekatnya diharapkan dapat meningkatkan *tax ratio* melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel independen lainnya peneliti tetap menggunakan variabel kesadaran perpajakan, karena apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Jatmiko, 2006).

Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak ini disusun dengan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah persepsi dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?”. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sedangkan pada bagian kegunaan penelitian akan diungkapkan secara khusus mengenai kegunaan yang akan dicapai dari hasil penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Secara khusus, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Direktur Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini sebagai bahan referensi perihal variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan terhadap pengembangan teori perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Serta berisi uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Teori yang menjadi landasan penelitian adalah teori atribusi, teori pembelajaran sosial, kepatuhan Wajib Pajak, persepsi, Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan. Penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut:

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah

perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, misal: kemampuan, pengetahuan atau usaha. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, misal: keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Robbins, 1996).

Menurut Robbins (1996), penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan maka disebut kekhususan. Apakah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sumber ketidakadilan bagi Wajib Pajak lainnya karena telah mengeluarkan dana dari penghasilan mereka untuk kepentingan pajak? Yang ingin diketahui adalah apakah perilaku ini luar biasa atau tidak? Jika luar biasa, maka kemungkinan besar pengamat memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tidak, hal ini akan dinilai sebagai sifat internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Contoh perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kriteria ini jika semua Wajib Pajak memilih jalan yang sama untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari perspektif atribusi, apabila konsensusnya tinggi, maka

termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Contoh Wajib Pajak hanya melakukan satu kali tidak memenuhi kewajiban perpajakannya namun dipersepsikan sama dengan Wajib Pajak yang tidak patuh pajak. Semakin konsisten perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Suyatmin (2004). Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB.

2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins,

1996). Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Contoh seseorang yang tidak patuh pajak akan belajar mematuhi perpajakan jika pegawai pajak telah melakukan pengelolaan perpajakan sebagaimana mestinya.

2. Proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia. Contoh seseorang mematuhi perpajakan dengan cara mengingat bahwa fasilitas Negara yang didapat adalah hasil pengelolaan pajak yang baik.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Contoh seseorang akan patuh terhadap pajak jika masyarakat di sekitarnya telah sadar serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Contoh dengan penyuluhan dan pelayanan pajak yang baik, diharapkan mampu merangsang individu-individu untuk berperilaku terhadap perpajakan.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya, uang pajak yang mereka bayarkan telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori pembelajaran sosial salah satunya adalah penelitian Jatmiko (2006).

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 2001 dalam Miladi, 2010). Kepatuhan pajak menurut Muliari (2011) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung

arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak di audit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

2.1.4 Persepsi

Persepsi merupakan proses awal dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi manusia menerima informasi dari dunia luar untuk kemudian dimasukkan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak. Pada hakikatnya, persepsi adalah proses yang dialami seseorang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses

pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson *et al* (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menterjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipersepsikan oleh seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Individu menangkap informasi (realitas) yang ada disekitar dengan menggunakan inderanya, kemudian dengan persepsinya diolah dan diberi arti. Berdasarkan itulah maka individu tersebut bersikap terhadap suatu hal. Apapun yang ada di lingkungan sekitar dan ditangkap oleh indera tidak diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian tersebut tergantung pada orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan, serta sekelilingnya.

Menurut Robbins (2001) dalam Miladi (2010), persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kepribadian, semua corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam.
- b. Motif, merupakan faktor internal yang dapat merangsang perhatian, adanya motif menyebabkan munculnya keinginan individu melakukan sesuatu dan juga sebaliknya.
- c. Kepentingan, hal yang paling utama yang ingin diperoleh atau yang ingin didapatkan yang dapat berguna bagi individu.

- d. Pengalaman masa lalu, suatu rangsangan yang muncul atau terjadi secara berulang-ulang akan menarik perhatian sebelum mencapai titik jenuh.
- e. Harapan, yang akan menentukan pesan mana yang akan dipilih tersebut akan ditata dan diinterpretasikan.

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi objek dimana stimulus yang akan dipersepsikan adalah pajak, dengan hal ini yang ingin diketahui adalah penilaian Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

2.1.5 Sensus Pajak Nasional

Dalam rangka pendataan objek pajak guna memperluas basis pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui Sensus Pajak Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/ PMK.03/ 2011 Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara.

Dasar-dasar hukum Sensus Pajak Nasional yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

Tujuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah untuk menjangkau seluruh potensi perpajakan dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perpajakan (tiga cara bertindak dalam perpajakan). Isinya, “pemungutan pajak yang sebaik-baiknya meliputi: segenap subjek pajak yang seharusnya; objek pajak yang semestinya; dan tepat pada waktu serta jumlahnya”. Sensus Pajak Nasional dilaksanakan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di lokasi sentra bisnis, *high rise building* atau perkantoran. Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah

1. Belum ber-NPWP, diberikan NPWP
2. Belum bayar pajak, agar membayar pajak
3. Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT
4. Memiliki utang pajak, agar melunasinya
5. Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan

Manfaat Sensus Pajak Nasional antara lain: (1) menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak; (2) meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemenuhan

dan kewajiban perpajakan; (3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjadi warga Negara.

Dokumen untuk keperluan pelaksanaan SPN adalah (1) Surat Pemberitahuan Sensus, (2) Formulir Isian Sensus (FIS), yakni formulir yang memuat data-data detail tentang subjek sensus, lokasi sensus, dan kondisi subjek sensus. Dokumen FIS dibedakan antara FIS Orang Pribadi dan FIS Badan.

Dokumen yang dipersiapkan untuk keperluan SPN oleh subjek sensus Badan, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika subyek sensus Badan adalah PKP
3. Akte Pendirian
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB
6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus

Untuk subjek sensus Orang Pribadi, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan PKP, jika subyek sensus Orang Pribadi adalah PKP
3. KTP/Paspor/KITAS
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilakukan sesuai dengan tentang pedoman teknis Sensus Pajak Nasional yang dijelaskan pada PER-30/PJ/2011.

Pedoman teknis SPN meliputi:

1. Pedoman teknis persiapan

Kegiatan persiapan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Pedoman teknis persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a PER-30/PJ/2011 meliputi:

a. Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN.

b. Proses pembuatan rencana kerja

Proses pembuatan rencana kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN yaitu: penentuan prioritas lokasi; jumlah objek pajak yang akan disensus; sarana dan prasarana; sumber dan satuan biaya; jadwal pelaksanaan; dan struktur tim.

c. Proses penyediaan data

Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan di Tingkat KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat.

d. Proses koordinasi internal dan eksternal

Proses koordinasi meliputi proses koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN di tingkat KPP. Koordinasi internal adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan antar anggota tim maupun sub tim untuk menjamin efektifitas pelaksanaan. Sedangkan koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat KPP.

2. Pedoman teknis pelaksanaan

Pedoman teknis persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b PER-30/PJ/2011 meliputi:

a. Proses pencacahan

Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan.

b. Proses pelaporan

Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman Formulir Isian Sensus (FIS) sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman FIS.

c. Proses asistensi

Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawasi pelaksanaan SPN.

3. Pedoman teknis monitoring dan evaluasi

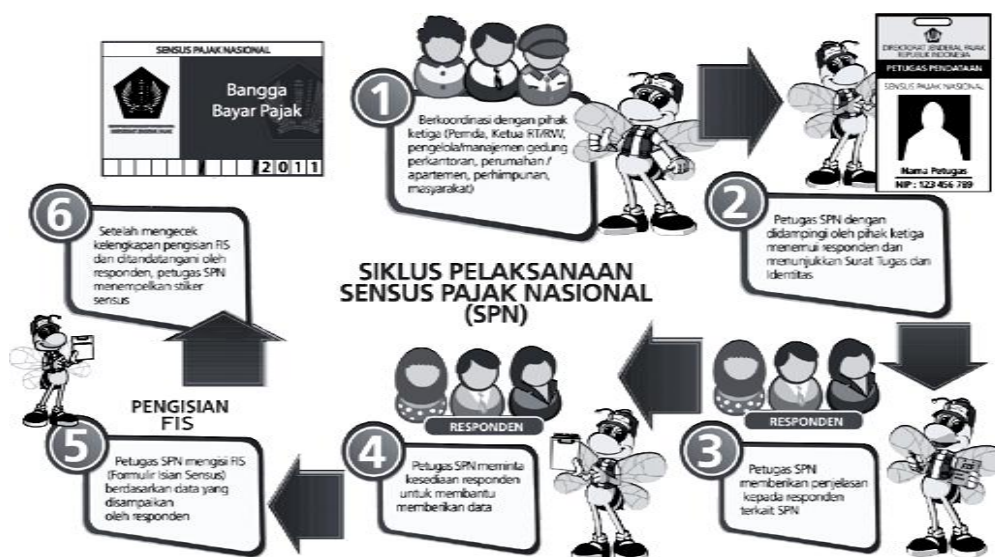
Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau secara rutin pelaksanaan kegiatan SPN secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut SPN. *Input* dalam kegiatan monitoring ini berupa laporan pelaksanaan harian dan laporan hasil perekaman FIS. Keseluruhan pelaporan dalam SPN akan diproses melalui sistem aplikasi SPN sehingga manajemen akan dapat melihat laporan monitoring pelaksanaan SPN secara *real time* sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan evaluasi merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan *feed back* untuk penyempurnaan.

Secara singkat, tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Tahap Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional



1. Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
2. Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.
3. Petugas SPN kemudian menunjukkan surat tugas dan identitas.
4. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
5. Untuk pengisian FIS, Petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
 - b. Menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
6. Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS.
7. Selanjutnya Petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.

2.1.6 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan yang mendorong dilakukannya suatu kegiatan. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Ahmadi (1998:125), kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

Berdasarkan dengan beberapa pengertian diatas, maka di dalam kesadaran terdapat hal-hal seperti:

- a. Pengalaman, merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan.
- b. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima.
- c. Keyakinan, menjadi yakin mengenai persoalan berdasarkan pikiran dan perasaan dari pengalaman informasi yang diperoleh dan dalam keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan sukarela.
- d. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan (Manik Asri, 2009 dalam Muliari, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Seperti yang dikemukakan oleh Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006) bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Di Indonesia, penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Namun

hasil dari penelitian masih belum konsisten. Berikut penjabaran dari penelitian terdahulu.

Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB baik secara parsial maupun secara simultan.

Suryadi (2006) meneliti tentang hubungan kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Suryadi (2006) menemukan bahwa jika Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dari hasil penelitian, hanya variabel kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Jatmiko (2006) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian Jatmiko (2006) menggunakan tiga variabel bebas yaitu sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Supriyati & Nur Hidayati (2008) menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sasaran dalam penelitian adalah Wajib Pajak Badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Nur Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Supadmi (2009) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas pelayanan. Dalam penelitiannya, Supadmi (2009) menemukan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4 K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar. Muliari & Setiawan (2011) menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian Muliari & Setiawan (2011) menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ringkasan penelitian- penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel yang Digunakan		Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Independen	Dependen		
Suyatmi n (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah • sanksi denda PBB • pelayanan fiskus • kesadaran bernegara • kesadaran perpajakan. 	kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB	Regresi Berganda	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
Suryadi (2006)	<ul style="list-style-type: none"> • kesadaran Wajib Pajak • pelayanan perpajakan • kepatuhan Wajib Pajak. 	kinerja penerimaan pajak	<i>Structural Equation Model</i> (SEM)	Variabel kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.
Jatmiko (2006)	<ul style="list-style-type: none"> • sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda • sikap WP terhadap pelayanan fiskus • sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. 	kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Berganda	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti	Variabel yang Digunakan		Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Independen	Dependen		
Supriyati & Nur Hidayati (2008)	<ul style="list-style-type: none"> • pengetahuan pajak • persepsi terhadap petugas pajak • persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh 	kepatuhan Wajib Pajak Badan	Uji Beda	Hanya variabel pengetahuan pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Supadmi (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas pelayanan. 	kepatuhan Wajib Pajak	Uji Beda	kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Muliari & Setiawan (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan • kesadaran Wajib Pajak 	kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Berganda	Semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: data diolah.

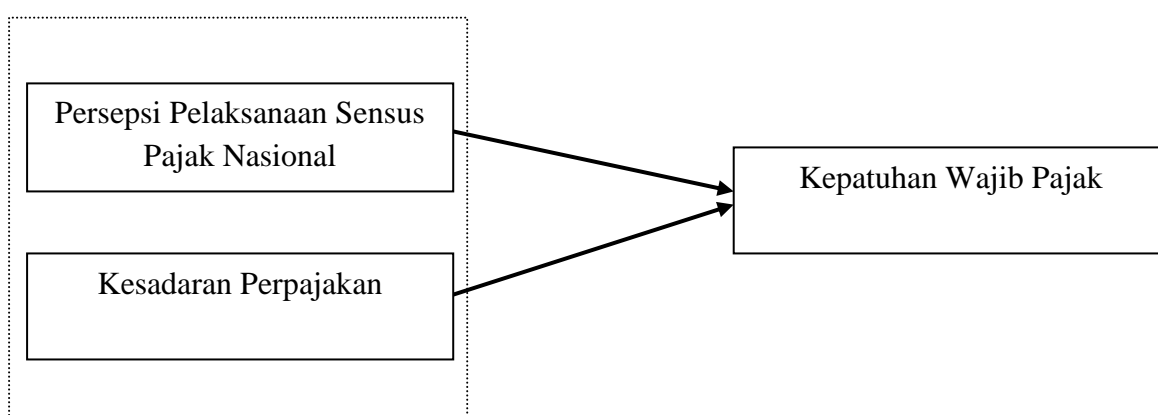
2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, variabel independen penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi pelaksanaan sensus pajak

nasional dan kesadaran perpajakan. Model dari kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah diuraikan yaitu tentang atribusi, pembelajaran sosial, teori kepatuhan Wajib Pajak dan teori-teori lainnya pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pembahasan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Alm, Bahl, Murray (1990) dalam John Hutagaol (2007), rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang

paling utama adalah disebabkan oleh tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Untuk memperoleh database yang lengkap dan akurat, maka diperlukan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak yaitu salah satunya melalui program Sensus Pajak Nasional.

Maria Karanta, *et al* (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Seperti yang dikemukakan oleh Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006) bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian terdapat sub bab yang terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Penjelasan sub bab tersebut sebagai berikut:

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan.

3.1.1 Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut Muliari (2011) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik

memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* 5 poin.

3.1.2 Variabel Independen: Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional merupakan pandangan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin untuk 5 pertanyaan.

3.1.3 Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen–elemen yang akan dibuat kesimpulan. Sedangkan elemen (unsur) adalah subjek dimana pengukuran akan

dilakukan. Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar berdasarkan hasil Sensus Pajak tahun 2011 di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data Kanwil DJP DIY, tercatat 313.657 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kantor Pajak Pratama (KPP) yang termasuk dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar KPP Lingkup Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kantor Pelayanan Pajak
1.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
3.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul
4.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
5.	Kantor Pelayanan Pajak Wonosari

Sumber: Lampiran SE - 10/PJ/2010

Tidak semua Wajib Pajak dalam populasi menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Alasan pengambilan sampel dengan metode *purposive*

sampling karena hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan yang berada di kawasan bisnis, *high rise building* atau perkantoran. Karena kawasan tersebut merupakan sasaran prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Wajib Pajak terdaftar yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional. Stiker ini merupakan tanda bahwa Wajib Pajak telah disensus oleh petugas pajak.

Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Muliary, 2011) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{313657}{1+313657(0.1^2)} = \frac{313657}{3137.57} = 99.968$$

Dibulatkan menjadi 100 sampel

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 0,1

Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 313.657 dan dengan persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (e) 0,1 penelitian ini menggunakan 100 sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2004 dalam Miladi, 2011). Data diperoleh dari jawaban para Wajib Pajak yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan peneliti mengenai persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin (*5 poin Likert Scale*).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20 *for Windows*. Analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama (Jatmiko, 2006).

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan

minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, nilai minimal jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam setiap variabel penelitian adalah 5 yang artinya responden menjawab sangat tidak setuju terhadap semua pertanyaan, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 25 yang artinya responden menjawab sangat setuju terhadap semua pertanyaan yang diajukan.

3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi

antar jawaban pertanyaan. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,600$ (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2006).

3.5.2.2 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan *over estimate* terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan *part-whole* (Azwar, 1997).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara nilai *corraleted item-total correlation* dengan koefisien *r* tabel. Jika *r* hitung $>$ *r* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *r* hitung $<$ dari *r* tabel berarti item tidak valid (gugur).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* (Ghozali, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan. Bila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $\text{tolerance} < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai $\text{tolerance} = 0,10$ sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan dua cara yaitu dengan menggunakan uji Glejser dan uji grafik *Scatter Plot*. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai

absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006) dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t \dots\dots\dots(1)$$

Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi –y sesungguhnya). Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu melihat pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)

α = Bilangan konstanta

$1\beta \dots n\beta$ = Koefisien arah regresi

- X1 = Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (Sensus)
X2 = Kesadaran perpajakan (Sadar)
e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

3.5.5 Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2007), Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0 \dots \dots \dots (3)$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0 \dots \dots \dots (4)$$

Artinya apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H_A diterima.
- b. Menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_A diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini

berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0 \dots\dots\dots (5)$$

Artinya adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0 \dots\dots\dots (6)$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

- Membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_A diterima.
- Jika nilai signifikansi t $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_A diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.